**BAB IX**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .**

Indikator-indikator yang ditetapkan dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan

pembangunan Kabupaten Sragen dalam kurun waktu tahun 2011-2016 adalah sebagai

berikut :

1. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**
2. **Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**
3. Pertumbuhan PDRB ADHK (Pertumbuhan Ekonomi) (%)
4. Laju Inflasi (%)
5. PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rupiah)
6. Indeks Gini
7. Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) ADHK
8. Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)
9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
10. **Fokus Kesejahteraan Sosial**
11. Daya Beli Masyarakat (Ribu Rupiah)
12. Angka Melek Huruf (%)
13. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
14. Angka Harapan Hidup (Tahun)
15. Angka Partisipasi Kasar (%) : PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
16. Angka Partisipasi Murni (%) : SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
17. Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)
18. Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)
19. Angka Kematian Balita (per 1000 KH)
20. Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan (%)
21. Rasio Penduduk (Angkatan Kerja) yang Bekerja (%)
22. **Fokus Seni Budaya dan Olahraga**
23. Jumlah Group Kesenian
24. Jumlah Group Olahraga
25. **Aspek Pelayanan Umum**
26. **Pelayanan Urusan Wajib**
27. **Pendidikan**
28. Persentase anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD dan TK/RA
29. Persentase TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain
30. Persentase TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri
31. Persentase APM SD/MI
32. Persentase APM SMP/MTs
33. Persentase Angka Putus Sekolah SD
34. Persentase ruang kelas SD/MI sesuai standar
35. Persentase SD/MI memiliki laboratorium IPA dan computer
36. Persentase SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar
37. Persentase SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan computer
38. Persentase SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar
39. Persentase Angka Kelulusan UASBN
40. Persentase lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs
41. Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs
42. Persentase Angka Kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs
43. Persentase lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan
44. Persentase APM SMA/SMK/MA
45. Persentase Angka Putus Sekolah
46. Persentase kelulusan UN SMA/SMK/MA
47. Persentase lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya
48. Persentase penduduk usia 15-44 tahun bias membaca dan menulis
49. Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun
50. Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus menerus
51. Persentase penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C
52. Persentase tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
53. Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran
54. Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus
55. Prosentase penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang
56. Prosentase lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah
57. Persentase lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi
58. Persentase lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja
59. Persentase tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan
60. Persentase lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan
61. Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus
62. Persentase penduduk difable menjadi peserta didik SLB
63. Persentase angka kelulusan SLB
64. Persentase guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
65. Persentase SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran
66. Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus
67. Persentase guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional
68. Persentase guru SD yang sertifikasi
69. Persentase guru SD/MI layak mengajar
70. Persentase guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan
71. Persentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi
72. Persentase guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi
73. Persentase guru SMA/SMK/MA layak mengajar
74. Persentase lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik
75. Persentase SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
76. Persentase SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
77. Persentase SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik
78. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000/sekolah RSBI (unit)
79. **Kesehatan**
80. Cakupan kunjungan ibu hamil K4
81. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
82. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
83. Cakupan pelayanan nifas (%)
84. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani (%)
85. Cakupan kunjungan bayi (%)
86. Cakupan desa/kelurahan Universsal Child Immunization (UCI) (%)
87. Cakupan pelayanan anak balita (%)
88. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
89. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)
90. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)
91. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
92. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)
93. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
94. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota (%)
95. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)
96. Cakupan Desa Siaga Aktif (%)
97. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)
98. Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (%)
99. Persentase gizi buruk (%)
100. Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)
101. Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)
102. Angka Kematian Balita (per 1000 KH)
103. **Pekerjaan Umum**
104. Panjang jalan (km)
105. Persentase panjang jalan kondisi baik (%)
106. Persentase panjang jalan permukaan beraspal (%)
107. Persentase jembatan kondisi baik (%)
108. Persentase saluran drainase/gorong-gorong kondisi baik (%)
109. Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik (%)
110. Persentase embung kondisi baik (%)
111. Persentase waduk kondisi baik (%)
112. **Perumahan Rakyat**
113. Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
114. Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)
115. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)
116. Jumlah rumah korban bencana alam yang terehabilitasi (%)
117. Jumlah pemakaman yang terpelihara dengan baik (unit)

**5.Penataan Ruang**

1. Jumlah dokumen penataan ruang kecamatan (buah)
2. Jumlah kasus pelanggaran tata ruang (kasus)
3. Jumlah bangunan ber-IMB (unit)

**6.Perencanaan Pembangunan**

1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh (buah)
2. Jumlah dokumen perencanaan kota (buah)
3. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (buah)
4. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya (buah)
5. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (buah)
6. Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (buah)
7. Jumlah dokumen pengendalian evaluasi monitoring

7.**Perhubungan**

1. Jumlah penumpang semua moda angkutan umum dalam setahun (orang)
2. Persentase sarana prasarana LLAJ dalam kondisi baik (%)
3. Persentase kendaraan wajib uji yang telah dilakukan uji kendaraan (%)
4. Persentase kendaraan yang layak jalan (%)
5. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (kasus)

**8.Lingkungan Hidup**

1. Persentase sampah yang terangkut (%)
2. Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)
3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)
4. Luas lahan kritis (ha)
5. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)
6. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)
7. Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah (%)

**9.Pertanahan**

1. Jumlah permohonan persertifikatan tanah ke Pemkab (ha)
2. Persentase luas lahan bersertifikat (%)
3. Jumlah kasus/konflik sengketa tanah milik negara yang terselesaikan (%)

**10. Kependudukan dan Catatan Sipil**

a. Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan

jaringan SIAK (kecamatan)

b. Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)

c. Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)

d. Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Sragen

**11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Persentase perempuan dalam eksekutif (PNS) (%)
2. Persentase perempuan dalam lembaga legislatif (%)
3. Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit)
4. Jumlah Focal Point yang terbentuk (unit)
5. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)
6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatlaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS (%)
7. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)
8. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)
9. Cakupan penegakan hokum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)
10. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum (%)
11. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)
12. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)
13. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (kasus)

**12.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

1. Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun (%)
2. Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%) (SDKI)
3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) (%)
4. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)
5. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)
6. Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa (PPKBD) (orang/desa)
7. Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
8. Jumlah PIK-KRR aktif (buah)
9. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)
10. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan
11. Remaja yang menjadi anggota BKR (%)
12. Lansia yang menjadi anggota BKL (%)

**13. Sosial**

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)
2. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya (%)
3. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)
4. Persentase wahana kesejahteraan sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)
5. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)
6. Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat (%)
7. Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial (%)

**14. Ketenagakerjaan**

1. Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%)
2. Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%)
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
4. Tingkat pengangguran terbuka (%)
5. Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%)
6. Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%)
7. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) (%)
8. Rasio UMK terhadap KHL (%)

**15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

1. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit)
2. Persentase UMKM yang telah berbadan hukum (memiliki ijin usaha) (unit)
3. Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank (unit)
4. Persentase koperasi aktif (%)

**16. Penanaman Modal**

1. Nilai realisasi investasi PMA (US $)
2. Nilai realisasi investasi PMDN (milyar rupiah)
3. Persentase realisasi investasi PMDN dari perijinan investasi yang disetujui
4. Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan

**17. Kebudayaan**

1. Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah (kali)
2. Jumlah kelompok seni daerah (kelompok)
3. Persentase benda purbakala dan peninggalan sejarah yang ditandai sebagai benda cagar budaya (%)
4. Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya (%)

**18. Kepemudaan dan Olah Raga**

1. Jumlah pemuda berprestasi (orang)
2. Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina (%)
3. Jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP) (kelompok)
4. Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah (orang)

**19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

1. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%)
2. Jumlah kasus tindak kriminalitas (kasus)
3. Jumlah Linmas (orang)
4. Jumlah relawan bencana kabupaten (orang)

**20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,**

**Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

1. Persentase pelaksanaan fungsi DPRD : Fungsi Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran
2. Jumlah Perda yang ditetapkan (buah)
3. Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah (%)
4. Waktu penyelesaian buku APBD murni (bulan)
5. Status audit keuangan daerah
6. Persentase tenaga pemeriksa yang professional (%)
7. Jumlah jenis pelayanan secara online (jenis)
8. Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah (buah)
9. Persentase keberhasilan pendidikan kedinasan terhadap peningkatan kinerja PNS (%)
10. Persentase keberhasilan peningkatan kapasitas aparatur terhadap peningkatan kinerja PNS (%)

**21. Ketahanan Pangan**

1. Jumlah desa rawan pangan (desa)
2. Skor Pola Pangan Harapan (%)
3. Tingkat konsumsi protein hewani (gram/kapita/hari)
4. Tingkat konsumsi energi (kkal/kap/hari)

**22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit)
2. Jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau program PNPM Mandiri (desa/kel)
3. Rata-rata persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (stimulant) (%)
4. Persentase PKK aktif (%)
5. Persentase Posyandu aktif (%)

**23. Statistik**

1. Jumlah dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (buah)
2. Persentase SKPD yang memiliki buku profil/statistik SKPD (%)

**24. Kearsipan**

1. Persentase arsip yang terolah dengan baik (%)
2. Persentase SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku
3. Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik

**25. Komunikasi dan Informatika**

1. Jumlah lembaga komunikasi masyarakat (radio) yang aktif
2. Jumlah warung internet (unit)
3. Jumlah SKPD yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi
4. Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet
5. Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif

**26. Perpustakaan**

1. Jumlah perpustakaan (unit)
2. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah (pengunjung)
3. Jumlah buku koleksi perpustakaan daerah
4. **Pelayanan Urusan Kewenangan Pilihan**
5. **Pertanian**
6. Nilai Tukar Petani
7. Produksi pertanian tanaman pangan utama : padi dan jagung
8. Produksi pertanian tanaman hortikultura utama : mangga dan cabe merah
9. Populasi produksi komoditas perkebunan utama : kelapa dan tebu rakyat
10. Populasi produksi komoditas peternakan utama : sapi potong dan kambing
11. Penyuluh Pertanian
12. **Kehutanan**
13. Jumlah produksi hasil hutan kayu
14. Jumlah produksi hasil hutan non kayu
15. Luas hutan rakyat (ha)
16. Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%)
17. Persentase kerusakan kawasan hutan (%)
18. Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu, pembalakan liar, dsb)
19. **Energi dan Sumberdaya Mineral**
20. Persentase lokasi penambangan yang masih dalam kondisi baik
21. Jumlah Penambangan Tanpa Ijin (PETI)
22. Persentase rumah yang menggunakan listrik (%)
23. Jumlah perusahaan memiliki SIPD
24. **Pariwisata**
25. Jumlah kunjungan wisata (orang)
26. Jumlah objek wisata yang telah dikembangkan (unit)
27. Jumlah pengeluaran belanja wisatawan : nusantara dan mancanegara
28. Jumlah kelompok sadar wisata (orang)
29. **Perikanan**
30. Jumlah produksi perikanan budidaya (kg)
31. Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita)
32. **Perdagangan**
33. Jumlah kasus peredaran barang ilegal dan tidak memenuhi standar
34. Nilai ekspor (US $)
35. Jumlah pasar tradisional kondisi baik
36. Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina
37. **Perindustrian**
38. Nilai produksi industri besar/sedang (ribu rupiah)
39. Nilai produksi industri kecil (ribu rupiah)
40. Nilai produksi industri rumahtangga (ribu rupiah)
41. Persentase industri yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi (%)
42. Persentase industri yang telah memiliki ijin usaha (%)
43. Jumlah cluster industri yang telah berkembang (buah)
44. Jumlah sentra industri yang telah berkembang (buah)
45. **Transmigrasi**
46. Jumlah MoU antar daerah kerjasama transmigrasi (buah)
47. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)
48. Jumlah calon transmigran (KK)
49. **Aspek Daya Saing Daerah**
50. **Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**
51. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (rupiah)
52. Nilai tukar petani

**2.Fokus Infrastruktur**

1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km)
2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang)
3. Luas wilayah (ha)
4. Luas wilayah produktif (ha)
5. Luas wilayah industri (ribu ha)
6. Luas wilayah kebanjiran (ribu ha)
7. Luas wilayah kekeringan (ribu ha)
8. Luas wilayah perkotaan (ribu ha)
9. Jenis dan jumlah bank dan cabang (unit)
10. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (unit)
11. Jumlah restoran dan rumah makan (unit)
12. Jumlah penginapan/hotel (unit)
13. Persentase rumahtangga (KK) yang menggunakan air bersih (%)
14. Ketersediaan daya listrik/daya listrik terpasang (Mwatt)
15. Jumlah kebutuhan listrik (Mwatt)
16. Persentase rumah yang menggunakan listrik (%)
17. Jumlah penduduk yang menggunakan handphone (orang)

**3.Fokus Investasi**

1. Jumlah kasus kriminalitas
2. Jumlah kasus demonstrasi dalam 1 tahun
3. Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan
4. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah)

**4.Fokus Sumberdaya Manusia**

1. Dependency Ratio (%)

Untuk mengetahui indikator kinerja pada masing-masing urusan kaitannya dengan target capaian setiap tahunnya diprediksikan seperti tabel berikut ini.

**Tabel 9.1**

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja**

**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

| **No.** | **Uraian** | **Kondisi Kinerja pada Awal Periode** | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | | **Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
|  |
| **I** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** | **Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pertumbuhan PDRB ADHK (Pertumbuhan Ekonomi) (%) | 5,50-6,02 | 5,70-6,22 | 5,90-6,42 | 6,10-6,62 | 6,30-6,82 | 6,40-7,02 | 6,42-7,25 | Bappeda |
| 2 | Laju Inflasi (%) | 6,77 | 6,56 | 6,40 | 6,24 | 6,12 | 6,08 | 6,00 | Bappeda |
| 3 | PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rupiah) | 7.604.504,79\* | 8.542.420,17 | 8,764.430,8 | 542,76.972 | 9.639292,2 | 9.865432,1 | 10,432.456,2 | Bappeda |
| 4 | Indeks Gini | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | Bappeda |
| 5 | Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) ADHK | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | Bappeda |
| 6 | Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%) | 17,49 | 17,08 | 16,89 | 16,12 | 16,02 | 15,68 | 15,12 | Bappeda |
| 7 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 70,90 | 71,32 | 71,89 | 72,40 | 72,90 | 73,50 | 74,50 | Bappeda |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Fokus Kesejahteraan Sosial** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Daya Beli Masyarakat (Ribu Rupiah) | 550 | 625 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1025 | Bappeda |
| 2 | Angka Melek Huruf (%) | 84,36 | 85,8 | 87,3 | 89,5 | 90,5 | 92,8 | 94,8 | Dinkes |
| 3 | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 6,9 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | Dinas Pendidikan |
| 4 | Angka Harapan Hidup (Tahun) | 72,56 | 72,60 | 72,80 | 73,20 | 74,00 | 74,20 | 75,56 | DKK |
| 5 | Angka Partisipasi Kasar (%) | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 15,8 | Disdik |
|  | PAUD (%) | 33,00 | 41,00 | 49,00 | 57,00 | 65,00 | 70,00 | 71,8 | Disdik |
|  | SD/MI (%) | 116,25 | 118,80 | 120,4 | 121,90 | 122,60 | 123,8 | 124,90 | Disdik |
|  | SMP/MTs (%) | 132,87 | 134,80 | 135,90 | 136,80 | 137,40 | 138,60 | 139,40 | Disdik |
|  | SMA/SMK/MA (%) | 83 | 85,30 | 86,60 | 87,70 | 88,60 | 89,60 | 90,,45 | Disdik |
| 6 | Angka Partisipasi Murni |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD/MI (%) | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | Disdik |
|  | SMP/MTs (%) | 90,50 | 91,86 | 91,98 | 92,40 | 93,49 | 94,60 | 95,20 | Disdik |
|  | SMA/SMK/MA (%) | 58,26 | 59,98 | 60,20 | 60,80 | 61,,51 | 62,,41 | 63,53 | Disdik |
| 7 | Angka Kematian Ibu (per 1000 00KH) | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DKK |
| 8 | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) | 4,37 | 4,27 | 4,08 | 4,02 | 3,86 | 3,68 | 3,54 | DKK |
| 9 | Angka Kematian Balita (per 100.000 KH) | 0.10 | 010 | 0.06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DKK |
| 10 | Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan (%) | 28,31 | 28,22 | 28,12 | 28,08 | 28,06 | 28,02 | 28,00 | Bappeda |
| 11 | Rasio Penduduk (Angkatan Kerja) yang Bekerja (%) | 10,98 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95,8 | Disnakertransos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **Fokus Seni Budaya dan Olahraga** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jumlah Group Kesenian | 1.253 | 1.278 | 1.303 | 1.329 | 1.356 | 1.383 | 1365 | Disbudparpora |
| 2 | Jumlah Group Olahraga | 340 | 361 | 384 | 408 | 433 | 460 | 468 | Disbudparpora |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Aspek Pelayanan Umum** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** | **Pelayanan Urusan Wajib** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Pendidikan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | % anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD dan TK/RA | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 70 | 71 | Disdik |
| b | % TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain | 52,50 | 63,00 | 64,26 | 64,90 | 66,85 | 80,22 | 81,56 | Disdik |
| c | % TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri | 50 | 56 | 62 | 68 | 72 | 73 | 74 | Disdik |
| d | % APM SD/MI | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,90 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | Disdik |
| e | % APM SMP/MTs | 90,50 | 91,66 | 92,6 | 94,8 | 96,4 | 98 | 98,7 | Disdik |
| f | % Angka Putus Sekolah SD | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | Disdik |
| g | % ruang kelas SD/MI sesuai standar | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | Disdik |
| h | % SD/MI memiliki laboratorium IPA dan komputer | 60,00 | 72,00 | 73,44 | 74,17 | 76,40 | 77,68 | 78,88 | Disdik |
| i | % SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | Disdik |
| j | % SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan komputer | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 62 | Disdik |
| k | % SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | Disdik |
| l | % Angka Kelulusan UASBN | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 99 | 99,8 | Disdik |
| m | % lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs | 99,87 | 99,89 | 99,90 | 99,92 | 99,94 | 99,96 | 99,98 | Disdik |
| n | % Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0,45 | 0,37 | 0,29 | 0,21 | 0,13 | 0,05 | 01,06 | Disdik |
| o | % Angka Kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs | 85,2 | 86,55 | 88,05 | 89,55 | 91,05 | 92,55 | 93,65 | Disdik |
| p | % lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan | 82,95 | 82,99 | 84,6 | 86,8 | 87,8 | 88,90 | 90,22 | Disdik |
| q | % APM SMA/SMK/MA | 58,26 | 60,8 | 62,6 | 64,6 | 66,4 | 68,6 | 68,8 | Disdik |
| r | % Angka Putus Sekolah  SLT | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | Disdik |
| s | % kelulusan UN SMA/SMK/MA | 95,5 | 95,5 | 96,1 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98,4 | Disdik |
| t | % lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | Disdik |
| u | % penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis | 60,00 | 65,20 | 73,44 | 74,17 | 76,40 | 91,68 | 92,78 | Disdik |
| v | Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun | 2.855 | 2.284 | 1.713 | 1.142 | 571 | 302 | 298 | Disdik |
| w | Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus menerus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Disdik |
| x | % penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C | 18 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | Disdik |
| y | % tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | Disdik |
| z | % pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran | 76 | 77 | 78 | 79 | 79,5 | 80 | 81 | Disdik |
| aa | Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Disdik |
| bb | % penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | Disdik |
| cc | % lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah | 83 | 86 | 89 | 92 | 97 | 100 | 102 | Disdik |
| dd | % lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Disdik |
| ee | % lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 46 | Disdik |
| ff | % tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan | 63,00 | 75,60 | 77,11 | 77,88 | 80,22 | 96,26 | 98,24 | Disdik |
| gg | % lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | Disdik |
| hh | Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Disdik |
| ii | % penduduk difable menjadi peserta didik SLB | 0,02 | 0,04 | 0,05 | O,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | Disdik |
| jj | % angka kelulusan SLB | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 | 100 | Disdik |
| kk | % guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan | 45 | 52 | 59 | 66 | 67 | 68 | 69 | Disdik |
| ll | & SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Disdik |
| mm | Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Disdik |
| nn | % guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Disdik |
| oo | % guru SD yang sertifikasi | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | Disdik |
| pp | % guru SD/MI layak mengajar | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Disdik |
| qq | % guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | Disdik |
| rr | % guru SMP/MTs yang bersertifikasi | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Disdik |
| ss | % guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi | 35 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Disdik |
| tt | % guru SMA/SMK/MA layak mengajar | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | Disdik |
| uu | % lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik | 45,00 | 54,00 | 55,08 | 55,63 | 57,30 | 68,76 | 69 | Disdik |
| vv | % SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Disdik |
| ww | % SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | 40,05 | 48,06 | 49,02 | 49,51 | 51,00 | 61,20 | 62 | Disdik |
| xx | % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Disdik |
| yy | Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000/sekolah RSBI (unit) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | Disdik |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Kesehatan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Cakupan kunjungan ibu hamil K4 | 90 | 93 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | DKK |
| b | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) | 4,70 | 4,10 | 3,50 | 3,20 | 2,67 | 1,88 | 2,1 | DKK |
| c | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) | 91 | 93 | 96 | 98 | 99 | 99 | 100 | DKK |
| d | Cakupan pelayanan nifas (%) | 58,01 | 69,61 | 71,00 | 71,71 | 73,86 | 88,63 | 89 | DKK |
| e | Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani (%) | 34,83 | 41,80 | 42,63 | 43,06 | 44,35 | 53,22 | 54 | DKK |
| f | Cakupan kunjungan bayi (%) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | DKK |
| g | Cakupan desa/kelurahan Universsal Child Immunization (UCI) (%) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | DKK |
| h | Cakupan pelayanan anak balita (%) | 55 | 65 | 75 | 90 | 95 | 95 | 96 | DKK |
| i | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin | 28,33 | 42,66 | 56,99 | 71,32 | 85,65 | 100 | 100 | DKK |
| j | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) | 61,65 | 73,98 | 75,46 | 76,21 | 78,50 | 94,20 | 95,1 | DKK |
| k | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%) | 80 | 87 | 93 | 95 | 100 | 100 | 100 | DKK |
| l | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 71,2 | DKK |
| m | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DKK |
| n | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DKK |
| o | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DKK |
| p | Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DKK |
| q | Cakupan Desa Siaga Aktif (%) | 203 | 205 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | DKK |
| r | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 82 | DKK |
| s | Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (%) | 65 | 69 | 73 | 76 | 81 | 85 | 86 | DKK |
| t | Persentase gizi buruk (%) | 12 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | DKK |
| u | Angka Kematian Ibu (per 100000. KH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DKK |
| v | Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) | 4,37 | 4,27 | 4,08 | 4,02 | 3,86 | 3,68 | 3,54 | DKK |
| w | Angka Kematian Balita (per 1000 KH) | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DKK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Pekerjaan Umum** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Panjang jalan (km) | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 993 | DPU |
| b | Persentase panjang jalan kondisi baik (%) | 53,49(827.97) | 54,29 | 55,11 | 55,93 | 56,77 | 57,62 | 58,3 | DPU |
| c | Persentase panjang jalan permukaan beraspal (%) | 47,25 | 49,61 | 52,09 | 54,70 | 57,43 | 60,30 | 61,4 | DPU |
| d | Persentase jembatan kondisi baik (%) | 90,94 | 90,94 | 90,97 | 90,97 | 91,03 | 91,05 | 92,4 | DPU |
| e | Persentase saluran drainase/gorong-gorong kondisi baik (%) | 33 | 36,3 | 39,93 | 43,92 | 48,32 | 53,15 | 54 | DPU |
| f | Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik (%) | 56 | 62 | 65 | 70 | 73 | 75 | 76 | DPU |
| g | Persentase embung kondisi baik (%) | 52,5 | 55,13 | 57,88 | 60,78 | 63,81 | 67 | 68 | DPU |
| h | Persentase waduk kondisi baik (%) | 52,5 | 55,13 | 57,88 | 60,78 | 63,81 | 67 | 68 | DPU |
| **4** | **Perumahan Rakyat** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) | 78 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 99 | DPPTR |
| b | Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 80 | DPPTR |
| c | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%) | 55,50 | 66,60 | 67,93 | 68,61 | 70,67 | 84,80 | 85,4 | DPPTR |
| d | Jumlah rumah korban bencana alam yang terehabilitasi (%) | 60,30 | 72,36 | 73,81 | 74,55 | 76,78 | 92,14 | 94,2 | DPPTR |
| e | Jumlah pemakaman yang terpelihara dengan baik (unit) | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | DPPTR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Penataan Ruang** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah dokumen penataan ruang kecamatan (buah) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DPPTR |
| b | Jumlah kasus pelanggaran tata ruang (kasus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | DPPTR |
| c | Jumlah bangunan ber-IMB (unit) | 2902,50 | 3483,00 | 3552,66 | 3588,19 | 3695,83 | 4435,00 | 4542,22 | DPPTR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Perencanaan Pembangunan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh (buah) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | Bappeda |
| b | Jumlah dokumen perencanaan kota (buah) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bappeda |
| c | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (buah) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Bappeda |
| d | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya (buah) | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Bappeda |
| e | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (buah) | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | Bappeda |
| f | Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (buah) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bappeda |
| g | Jumlah dokumen pengendalian evaluasi monitoring | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | Bappeda |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Perhubungan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah penumpang semua moda angkutan umum dalam setahun (orang) | 150000,00 | 180000,00 | 183600,00 | 185436,00 | 190999,08 | 229198,90 | 229496,08 | Dishub |
| b | Persentase sarana prasarana LLAJ dalam kondisi baik (%) | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 | 81 | Dishub |
| c | Persentase kendaraan wajib uji yang telah dilakukan uji kendaraan (%) | 61,50 | 73,80 | 75,28 | 76,03 | 78,31 | 93,97 | 94,2 | Dishub |
| d | Persentase kendaraan yang layak jalan (%) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | Dishub |
| e | Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (kasus) | 200 | 180 | 150 | 135 | 124 | 100 | 100 | Dishub |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Lingkungan Hidup** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Persentase sampah yang terangkut (%) | 63,68 | 76,41 | 77,94 | 78,72 | 81,08 | 97,29 | 98,2 | DPU |
| b | Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BLH |
| c | Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BLH |
| d | Kawasan suaka alam (ha) | 103,90 | 103,90 | 103,96 | 103,96 | 103,97 | 103,98 | 103,98 | Dishut |
| e | Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | Dishut |
| f | Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | BLH |
| g | Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah (%) | 2,40 | 2,88 | 2,94 | 2,97 | 3,06 | 3,67 | 3,80 | BLH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Pertanahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah permohonan persertifikatan tanah ke Pemkab (ha) | 300,00 | 360,00 | 367,20 | 370,87 | 382,00 | 458,40 | 458,90 | DPPTR |
| b | Persentase luas lahan bersertifikat (%) | 62,73 | 66,18 | 69,63 | 73,08 | 76,53 | 80,00 | 81,00 | DPPTR |
| c | Jumlah kasus/konflik sengketa tanah milik negara yang terselesaikan (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | DPPTR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Kependudukan dan Catatan Sipil** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Dispendukcapil |
| b | Persentase kepemilikan akta kelahiran (%) | 52,50 | 63,00 | 64,26 | 64,90 | 66,85 | 80,22 | 81,2 | Dispendukcapil |
| c | Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%) | 65,25 | 78,30 | 79,87 | 80,66 | 83,08 | 100 | 100 | Dispendukcapil |
| d | Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Sragen (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dispendukcapil |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Persentase perempuan dalam eksekutif (PNS) (%) | 30,00 | 36,00 | 36,72 | 37,09 | 38,20 | 45,84 | 46 | Bagian PP Setda Sragen |
| b | Persentase perempuan dalam lembaga legislatif (%) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 30 | Bagian PP Setda Sragen |
| c | Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit) | 18 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 38 | Bagian PP Setda Sragen |
| d | Jumlah Focal Point yang terbentuk (unit) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | Bagian PP Setda Sragen |
| e | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bagian PP Setda Sragen |
| f | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatlaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bagian PP Setda Sragen |
| g | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Bagian PP Setda Sragen |
| h | Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | Bagian PP Setda Sragen |
| i | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%) | 48,00 | 57,60 | 58,75 | 59,34 | 61,12 | 73,34 | 75 | Bagian PP Setda Sragen |
| j | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%) | 18,00 | 21,60 | 22,03 | 22,25 | 22,92 | 27,50 | 28 | Bagian PP Setda Sragen |
| k | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%) | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 50 | Bagian PP Setda Sragen |
| l | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%) | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 100 | Bagian PP Setda Sragen |
| m | Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (kasus) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Bagian PP Setda Sragen |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bagian PP Setda Sragen |
| **12** | **Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera** |  |  |  |  |  |  |  | Bagian PP Setda Sragen |
| a | Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun (%) | 25 | 23 | 22 | 20 | 17 | 10 | 15 | Bagian PP Setda Sragen |
| b | Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%) (SDKI) | 77,95 | 79,36 | 80,77 | 82,18 | 83,59 | 85 | 88 | Bagian PP Setda Sragen |
| c | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) (%) | 43 | 32 | 23 | 22 | 18 | 9 | 12 | Bagian PP Setda Sragen |
| d | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%) | 45 | 58 | 67 | 89 | 91 | 96 | 98 | Bagian PP Setda Sragen |
| e | Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | Bagian PP Setda Sragen |
| f | Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa (PPKBD) (orang/desa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Bagian PP Setda Sragen |
| g | Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB | 1 per 5 desa | 1 per 4 desa | 1 per 4 desa | 1 per 3 desa | 1 per 3 desa | 1 per 2 desa | 1 per 2  desa | Bagian PP Setda Sragen |
| h | Jumlah PIK-KRR aktif (buah) | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | Bagian PP Setda Sragen |
| i | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 72 | 73 | Bagian PP Setda Sragen |
| j | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bagian PP Setda Sragen |
| k | Remaja yang menjadi anggota BKR (%) | 1,3 | 2,5 | 4 | 5,8 | 8 | 13 | 13 | Bagian PP Setda Sragen |
| l | Lansia yang menjadi anggota BKL (%) | 28,50 | 34,20 | 34,88 | 35,23 | 36,29 | 43,55 | 44,4 | Bagian PP Setda Sragen |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Sosial** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%) | 40 | 50 | 66 | 77 | 88 | 100 | 100 | Dinsos |
| b | Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya (%) | 40 | 50 | 66 | 77 | 88 | 100 | 100 | Dinsos |
| c | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 88 | Dinsos |
| d | Persentase wahana kesejahteraan sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | Dinsos |
| e | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | Dinsos |
| f | Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | Dinsos |
| g | Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial (%) | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 | 10 | Dinsos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dinsos |
| **14** | **Ketenagakerjaan** |  |  |  |  |  |  |  | Dinsos |
| a | Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 62 | Dinsos |
| b | Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%) | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | Dinsos |
| c | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | Dinsos |
| d | Tingkat pengangguran terbuka (%) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Dinsos |
| e | Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%) | 25,3 | 30,24 | 35,18 | 40,12 | 45,06 | 50 | 54 | Dinsos |
| f | Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 | Dinsos |
| g | Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) (%) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 36 | Dinsos |
| h | Rasio UMK terhadap KHL (%) | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,8 | Dinsos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit) | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1252 | Disperindagkop & UMKM |
| b | Persentase UMKM yang telah berbadan hokum (memiliki ijin usaha) (unit) | 15,49 | 19,12 | 22,75 | 26,38 | 11,86 | 30 | 32 | Disperindagkop & UMKM |
| c | Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank (unit) | 15,00 | 18,00 | 18,36 | 18,54 | 19,10 | 22,92 | 23,5 | Disperindagkop & UMKM |
| d | Persentase koperasi aktif (%) | 83,59 | 86,87 | 90,15 | 93,43 | 96,71 | 100 | 100 | Disperindagkop & UMKM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Penanaman Modal** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Nilai realisasi investasi PMA (US $) | 450000 | 600000 | 700000 | 900000 | 950000 | 1600000 | 1620.000 | Kantor Penanaman Modal |
| b | Nilai realisasi investasi PMDN (milyar rupiah) | 58,29 | 66,62 | 74,95 | 83,28 | 91,61 | 99,92 | 99,94 | Kantor Penanaman Modal |
| c | Persentase realisasi investasi PMDN dari perijinan investasi yang disetujui (%) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 | Kantor Penanaman Modal |
| d | Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | BPPT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Kebudayaan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah (kali) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | Disbudpar |
| b | Jumlah kelompok seni daerah (kelompok) | 28 | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 61 | Disbudpar |
| c | Persentase benda purbakala dan peninggalan sejarah yang ditandai sebagai benda cagar budaya (%) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Disbudpar |
| d | Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya (%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | Disbudpar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Kepemudaan dan Olah Raga** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah pemuda berprestasi (orang) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | Disbudpar |
| b | Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina (%) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | Disbudparpora |
| c | Jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP) (kelompok) | 54 | 62 | 71 | 82 | 95 | 109 | 100 | Disbudparpora |
| d | Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah (orang) | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | Disbudpar |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%) | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 98 | 99 | Kantor Kesbanglinmas |
| b | Jumlah kasus tindak kriminalitas (kasus) | 269 | 231 | 194 | 156 | 118 | 80 | 85 | Kantor Kesbanglinmas |
| c | Jumlah Linmas (orang) | 8.594 | 8.769 | 8.948 | 9.131 | 9.317 | 9.507 | 9608 | Kantor Kesbanglinmas |
| d | Jumlah relawan bencana kabupaten (orang) | 230 | 243 | 256 | 270 | 285 | 301 | 302 | Kantor Kesbanglinmas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Persentase pelaksanaan fungsi DPRD :   * Fungsi Legislasi * Fungsi Pengawasan * Fungsi Penganggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
| b | Jumlah Perda yang ditetapkan (buah) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Sekretariat DPRD |
| c | Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 199 | Sekretariat DPRD |
| d | Waktu penyelesaian buku APBD murni (bulan) | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | DPPKAD |
| e | Status audit keuangan daerah | Wajar  dengan pengecuali  an | Wajar  dengan pengecuali  an | Wajar  dengan pengecuali  an | Wajar  dengan pengecuali  an | Wajar  tanpa pengecuali  an | Wajar  tanpa pengecuali  an | Wajar  Tanpa  pengecualian | DPPKAD |
| f | Persentase tenaga pemeriksa yang professional (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | Kantor Inspektorat |
| g | Jumlah jenis pelayanan secara online (jenis) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | BPPT |
| h | Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah (buah) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | Bappeda |
| i | Persentase keberhasilan pendidikan kedinasan terhadap peningkatan kinerja PNS (%) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | BKD |
| j | Persentase keberhasilan peningkatan kapasitas aparatur terhadap peningkatan kinerja PNS (%) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | BKD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Ketahanan Pangan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah desa rawan pangan (desa) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | Kantor Ketahanan Pangan |
| b | Skor Pola Pangan Harapan (%) | 86,66 | 88,32 | 89,98 | 91,64 | 93,30 | 95 | 96 | Kantor Ketahanan Pangan |
| c | Tingkat konsumsi protein hewani (gram/kapita/hari) | 59,92 | 60,94 | 61,96 | 62,98 | 64,00 | 65,00 | 65 | Kantor Ketahanan Pangan |
| d | Tingkat konsumsi energi (kkal/kap/hari) | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 20 | 20 | Kantor Ketahanan Pangan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit) | 50 | 56 | 65 | 70 | 76 | 80 | 80 | BPMD |
| b | Jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau program PNPM Mandiri (desa/kel) | 18 | 23 | 27 | 28 | 30 | 45 | 48 | BPMD |
| c | Rata-rata persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (stimulant) (%) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | BPMD |
| d | Persentase PKK aktif (%) | 94,53 | 95,62 | 96,71 | 97,8 | 98,89 | 100 | 100 | BPMD |
| e | Persentase Posyandu aktif (%) | 58,50 | 70,20 | 71,60 | 72,32 | 74,49 | 89,39 | 88,67 | BPMD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Statistik** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (buah) | 25 | 25 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | Bappeda |
| b | Persentase SKPD yang memiliki buku profil/statistik SKPD (%) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Bappeda |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Kearsipan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Persentase arsip yang terolah dengan baik (%) | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 80 | Kantor arsip dan dokumentasi |
| b | Persentase SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku (%) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Kantor arsip dan dokumentasi |
| c | Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 84 | Kantor Arsipdan Dokumentasi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Komunikasi dan Informatika** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah lembaga komunikasi masyarakat (radio) yang aktif | 150 | 200 | 260 | 300 | 600 | 1200 | 1200 | Diskominfo |
| b | Jumlah warung internet (unit) | 28 | 80 | 100 | 150 | 180 | 190 | 190 | Diskominfo |
| c | Jumlah SKPD yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi | 10 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | 21 | Diskominfo |
| d | Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet | 9 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 28 | Diskominfo |
| e | Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif | 9 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 29 | Diskominfo |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **Perpustakaan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah perpustakaan (unit) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Kantor Perpus dan Arsip |
| b | Jumlah pengunjung perpustakaan daerah (pengunjung) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 12000 | Kantor Perpus dan Arsip |
| c | Jumlah buku koleksi perpustakaan daerah | 21.275 | 22.275 | 23.275 | 24.275 | 25.275 | 26.275 | 26,280 | Kantor Perpus dan Arsip |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Pelayanan Urusan Kewenangan Pilihan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Pertanian** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Nilai Tukar Petani | 100 | 100,5 | 101 | 101,5 | 102 | 103 | 104 | Bappeda |
| b | Produksi pertanian tanaman pangan utama :   * Padi (ton) * Jagung(ton) | 300  543.381  74.196 | 400  578.490  75.200 | 500  588.600  75.650 | 600  598.750  75.890 | 700  600.350  76.400 | 1000  620.256  76.680 | 980  650.450  76.960 | Distanbun |
| c | Produksi pertanian tanaman hortikultura utama :   * mangga * cabe merah | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1210 | Distanbun |
| d | Populasi produksi komoditas perkebunan utama :   * kelapa * tebu rakyat | 15000,00 | 18000,00 | 18360,00 | 18543,60 | 19099,91 | 22919,89 | 22599,9 | Distanbun |
| e | Populasi produksi komoditas peternakan utama :   * sapi potong * kambing | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 10.000 | Disnakkan |
| f | Penyuluh Pertanian | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | Disnakkan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Kehutanan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah produksi hasil hutan kayu | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1.0.000 | Dishut |
| b | Jumlah produksi hasil hutan non kayu | 2.913 | 2.919 | 2.924 | 2.930 | 2.936 | 2.942 | 2950 | Dishut |
| c | Luas hutan rakyat (ha) | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | Dishut |
| d | Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%) | 15,45 | 17,36 | 19,27 | 21,18 | 23,09 | 25 | 25 | Dishut |
| e | Persentase kerusakan kawasan hutan (%) | 37,50 | 45,00 | 45,90 | 46,36 | 45,75 | 40,2 | 38,8 | Dishut |
| f | Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu, pembalakan liar, dsb) | 114 | 97 | 82 | 70 | 60 | 51 | 50 | Dishut |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Energi dan Sumberdaya Mineral** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Persentase lokasi penambangan yang masih dalam kondisi baik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | Distamben |
| b | Jumlah Penambangan Tanpa Ijin (PETI) | 70 | 60 | 50 | 20 | 10 | 12 | 14 | Distamben |
| c | Persentase rumah yang menggunakan listrik (%) | 52,50 | 63,00 | 64,26 | 64,90 | 66,85 | 80,22 | 75,8 | Distamben |
| d | Jumlah perusahaan memiliki SIPD | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | Distamben |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Pariwisata** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah kunjungan wisata (orang) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6200 | 6250 | Disbudparpora |
| b | Jumlah objek wisata yang telah dikembangkan (unit) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | Disbudparpora |
| c | Jumlah pengeluaran belanja wisatawan :   * wisatawan nusantara (US $) * wisatawan mancanegara (rupiah) | 2000000 | 3000000 | 4000000 | 5000000 | 6000000 | 10000000 | 1000.000 | Disbudparpora |
| d | Jumlah kelompok sadar wisata (orang) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Disbudparpora |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Perikanan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah produksi perikanan budidaya (kg) | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 70.000 | Disnakkan |
| b | Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita) | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | Disnakkan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Perdagangan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah kasus peredaran barang illegal dan tidak memenuhi standar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disperindag & UMKM |
| b | Nilai ekspor (US $) | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110.000 | Disperindag & UMKM |
| c | Jumlah pasar tradisional kondisi baik | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | Disperindag & UMKM |
| d | Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | Disperindag & UMKM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Perindustrian** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Nilai produksi industri besar/sedang (ribu rupiah) | 61336315,50 | 73603578,60 | 75075650,17 | 75826406,67 | 78101198,87 | 93721438,65 | 947.800.34,75 | Disperindag & UMKM |
| b | Nilai produksi industri kecil (ribu rupiah) | 1544700,00 | 1853640,00 | 1890712,80 | 1909619,93 | 1966908,53 | 2360290,23 | 2,356,650,25 | Disperindag & UMKM |
| c | Nilai produksi industri rumahtangga (ribu rupiah) | 344.412.515 | 360.703.227 | 377.764.490 | 395.632.750 | 414.346.179 | 433.944.754 | 435,945,24 | Disperindag & UMKM |
| d | Persentase industri yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi (%) | 30,00 | 36,00 | 36,72 | 37,09 | 38,20 | 45,84 | 45,24 | Disperindag & UMKM |
| e | Persentase industri yang telah memiliki ijin usaha | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | Disperindag & UMKM |
| f | Jumlah cluster industri yang telah berkembang (buah) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | Disperindag & UMKM |
| g | Jumlah sentra industri yang telah berkembang (buah) | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | Disperindag & UMKM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Transmigrasi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah MoU antar daerah kerjasama transmigrasi (buah) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | Disnakertransos |
| b | Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 900 | Disnakertransos |
| c | Jumlah calon transmigran (KK) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Disnakertransos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Aspek Daya Saing Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (rupiah) | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 3500000 | 4000000 | 410.000 | Bappeda |
| b | Nilai tukar petani | 100 | 100,5 | 101 | 101,5 | 102 | 103 | 104 | Bappeda |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Fokus Infrastruktur** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | Dinas PU |
| b | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang) | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 30.000 | Dishub |
| c | Luas wilayah (ha) | 182.058,8 | 182.058,8 | 182.058,8 | 182.058,8 | 182.058,8 | 182.058,8 | 182.600,9 | Bappeda |
| d | Luas wilayah produktif (ha) | 40,83 | 40,83 | 40,83 | 40,83 | 40,83 | 40,83 | 40,83 | Bappeda |
| e | Luas wilayah industri (ribu ha) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Bappeda |
| f | Luas wilayah kebanjiran (ribu ha) | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 48 | Bappeda |
| g | Luas wilayah kekeringan (ribu ha) | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 49 | Bappeda |
| h | Luas wilayah perkotaan (ribu ha) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Bappeda |
| i | Jenis dan jumlah bank dan cabang (unit) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | Bagian Perekonomian Setda |
| j | Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (unit) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | Bagian Perekonomian Setda |
| k | Jumlah restoran dan rumah makan (unit) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 48 | Disbudparpora |
| l | Jumlah penginapan/hotel (unit) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | Disbudparpora |
| m | Persentase rumahtangga (KK) yang menggunakan air bersih (%) | 37,50 | 45,00 | 45,90 | 46,36 | 47,75 | 57,30 | 57,8 | DKK |
| n | Ketersediaan daya listrik/daya listrik terpasang (Mwatt) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 73 | Distamben |
| o | Jumlah kebutuhan listrik (Mwatt) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | Distamben |
| p | Persentase rumah yang menggunakan listrik (%) | 45,00 | 54,00 | 55,08 | 55,63 | 57,30 | 68,76 | 68,76 | Distamben |
| q | Jumlah penduduk yang menggunakan handphone (orang) | 11.256 | 12.256 | 13.256 | 14.256 | 15.256 | 16.256 | 16,259 | Diskominfo |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Fokus Investasi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Jumlah kasus kriminalitas | 90 | 80 | 70 | 30 | 20 | 10 | 12 | Kantor Kesbanglinmas |
| b | Jumlah kasus demonstrasi dalam 1 tahun | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Kantor Kesbanglinmas |
| c | Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | BPPT |
| d | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | Kantor Penanaman Modal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Fokus Sumberdaya Manusia** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dependency Ratio (%) | 51,49 | 51,50 | 51,50 | 51,52 | 51,56 | 51,57 | 51,58 | Dispendukcapil |